

Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan Di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan

Rita Lestari¹, Panca Setyo Prihatin²

^{1,2}Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Islam Riau

* ritalestari@student.uir.ac.id

Abstrak

Sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah pada petani sawit dan tanaman pangan, Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam 5 (lima) tahun kedepan akan melaksanakan kebijakan bantuan pupuk secara bertahap. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas pertanian yang penting dan strategis di Kabupaten Pelalawan karena peranannya yang cukup besar dalam mendorong perekonomian rakyat, mengingat hal itu sesuai visi, misi dan program unggulan bupati sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pemberian Pupuk Bagi Petani Kelapa Sawit di Kabupaten Pelalawan. Untuk program bantuan pupuk bertujuan sebagai motivasi bagi petani untuk melakukan perawatan karena melihat hasil produksi yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan jumlah lahan yang dimiliki masyarakat/petani, karena kebiasaan hanya melakukan perawatan serta kurang memberi pupuk bagi kebun. Kemudian jika kebun dapat dirawat secara baik tentu akan memeberikan pendapatan besar bagi petani, maka kesejahteraan baik petani ataupun masyarakat dapat meningkat. Pelaksanaan program ini cukup berjalan lancar dan pada indikator struktur birokrasi yang jelas hal ini terlihat dari terbitnya peraturan-peraturan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait pelaksanaan program bantuan pupuk. Akan tetapi pelaksanaan ini masih memiliki kekurangan terkait komunikasi antara pihak Pemerintah Desa Air Hitam dengan masyarakat, dimana masyarakat tidak mendapatkan informasi terkait kelanjutan program bantuan pupuk yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan.

Kata Kunci: Implementasi, Program, Bantuan Pupuk

Abstract

As a form of local government concern for fail palm farmers and food crops, the Pelalawan District Government in the next 5 (five) years will implement at fertilizer assistance policy in stages. Palm oil is an important and strategic agricultural commodity in Pelalawan Regency because of its significant role in boosting the people's economy, bearing in mind that is in accordance with the vision, mission and superior programs of the regent in accordance with Pelalawan Regent Regulation Number 40 of 2022 concerning Provision of Fertilizers to Increase Production For Palm Oil Farmers in Pelalawan Regency. The fertilizer assistance program aims to motivate farmers to carry out maintenance because they see that the production results are sometimes not in accordance with the amount of land owned by the community/farmers, because they usually only do maintenance and don't provide enough fertilizer for the garden. Then if the garden can be cared for properly it will certainly provide a large income for farmers then the welfare of farmers or the community can increase. The implementation of this program went quite smoothly and the indicators of a clear bureaucratic structure could be seen from the issuance of regulations and policies issued by government regarding the implementation of the fertilizer assistance program. However, this implementation still has deficiencies related to communication between the Air Hitam Village Government and the community, where the community does not receive information regarding the continuation of the fertilizer assistance program organized by the Pelalawan Regency Government.

Keywords: Implementation, Program, Fertilizer Assistance

PENDAHULUAN

Kabupaten pelalawan merupakan salah satu sentra produksi minyak sawit (CPO) dan karet dalam alam di Provinsi Riau. Produksi minyak kelapa sawit Kabupaten Pelalawan memiliki tren meningkat yaitu dari 1.247.072 ton pada Tahun 2015 meningkat menjadi 1.884.333,17 juta ton pada Tahun 2019 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12% per tahun. Pada masa yang sama, produksi karet alam (KKK), terjadi penurunan produksi yaitu sebesar 40.609 ribu ton pada Tahun 2015, menurun menjadi 34.481,12 ton pada tahun 2019 dengan rata-rata penurunan produksi sebesar -3,8% pertahun.

Salah satu visi, misi dan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Pelalawan terpilih yang tengah berjalan saat ini adalah Bantuan Pupuk sesuai dengan Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Pemberian Bantuan Pupuk Untuk Meningkatkan Produksi Bagi Petani Kelapa Sawit Di Kabupaten Pelalawan. Program bantuan pupuk bertujuan sebagai motivasi bagi petani untuk melakukan perawatan karena melihat hasil produksi yang dihasilkan kadang tidak sesuai dengan jumlah lahan yang mereka punya, karena kebiasaan hanya melakukan perawatan serta kurang memberi pupuk perawatan bagi kebun. Kemudian kalau kebun dirawat secara baik tentu akan memberikan pendapatan besar bagi petani lalu daya beli petani meningkat dan tentu terlaksana transaksi UMKM jual beli di pasar, pertumbuhan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dapat berjalan dan meningkat.

Kecamatan Ukui yang memiliki 1 Kelurahan dan 11 Desa diantaranya Kelurahan Ukui, Desa Ukui Dua, Desa Bukit Gajah, Desa Air Emas, Desa Tri Mulya Jaya, Desa Bukit Jaya, Desa Lubuk Kembang Sari, Desa Silikuan Hulu, Desa Kampung Baru, Desa Air Hitam dan Desa Lubuk Kembang Bunga. Desa/Kelurahan yang memenuhi persyaratan/ketentuan untuk mengajukan bantuan pupuk hanya ada 4 (empat) desa/kelurahan yaitu Kelurahan Ukui, Desa Ukui Dua, Desa Bukit Gajah, Desa Bagan Limau, itu artinya ada 8 (delapan) desa yang tidak mengajukan ataupun desa tersebut tidak memenuhi kriteria.

Berdasarkan hal tersebut data yang sudah masuk dari keempat desa di Kecamatan ukui yang mengajukan penerimaan bantuan sudah terdapat 243 data yang masuk. Dari pengamatan sementara dilapangan pelaksanaan program Bantuan Pupuk oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan belum berjalan dengan baik, karena belum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur. Berdasarkan observasi awal peneliti terindikasi permasalahan bahwa pelaksanaan program Bantuan Pupuk tersebut : Program Bantuan Pupuk yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan sampai saat observasi belum terlaksana ataupun bantuan belum tersalurkan di Desa Air Hitam. Akan tetapi belum terlaksananya bantuan pupuk ini adanya pemberian kartu penerima bantuan kepada Petani/Pekebun. Dimana ini menjadi sebuah tanda tanya oleh masyarakat Desa Air Hitam sendiri karena sampai saat ini belum adanya kejelasan atau tindak lanjut dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan mengenai Bantuan Pupuk tersebut.

METODE PENELITIAN

Menurut Sugiyono (2018:2), metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan.

Tipe penelitian ini adalah menggunakan penelitian deskriptif yang dilaksanakan dengan cara survei serta menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun pengertian deskriptif menurut Sugiyono (2018:147) adalah metode yang digunakan untuk menganalisis

data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.

Pemilihan subjek penelitian bisa mengarahkan peneliti pada data yang semakin spesifik dalam menjawab masalah penelitian. Sebelum penelitian dimulai sudah seharusnya ada pedoman yang akan dikaitkan dengan topik, serta perkiraan orang yang akan dijadikan sebagai narasumber yaitu “key informan” dan “informan”. Key informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Pertanian Kabupaten Pelalawan, karena ia merupakan penanggung jawab dalam implementasi penyaluran bantuan pupuk pemerintah Kabupaten Pelalawan. Sehingga memang memiliki pengetahuan sepenuhnya mengenai permasalahan penelitian. Menurut Moleong (2006:132), informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Selain itu menurut Andi (2010:147), Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, Kepala Desa Air Hitam, Pendamping Desa Air Hitam, Ketua kelompok Tani, Ketua RT 03 dan Masyarakat Karena penulis menilai orang tersebut mampu memberikan informasi yang penulis butuhkan dilapangan terkait dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis dan bersumber dari hasil observasi langsung di Kantor Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai responden sehubungan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis memanfaatkan waktu yang formal untuk melakukan wawancara terstruktur dengan Kepala Bidang Dinas Perkebunan dan Peternakan kabupaten Pelalawan. Observasi (pengamatan langsung) yaitu mengamati secara langsung objek yang diteliti dengan alasan untuk mengetahui sejauh mana Pelaksanaan Penyaluran Bantuan Pupuk Pemerintah Kabupaten Pelalawan. Dokumentasi, yaitu cara mengumpulkan data-data seperti struktur organisasi, penjelasan awal pembentukan program bantuan, dan dokumen-dokumen lainnya sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu merupakan salah satu dari jenis penelitian kualitatif. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Komunikasi

Pada suatu badan atau organisasi pemerintah, misalnya komunikasi merupakan hal yang sering terjadi masalah dalam suatu proses mengirim berita kebawah di dalam organisasi atau dari suatu organisasi ke organisasi lain dan komunikator lain sering mengalami gangguan baik disengaja maupun tidak disengaja. Maka dari itu keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar pelaksanaan mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ada komunikasi yang benar untuk dapat ditransmisikan kepada kelompok sasaran, sehingga akan mengurangi gangguan dalam implementasi.

Dengan ini suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh komunikasi kepada para implementor kebijakan secara tepat. Disamping itu, koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam pelaksanaan kebijakan. Semakin baik koordinasi

kamunikasi di antara pihak terlibat dalam pelaksanaan kebijakan maka kesalahan akan semakin kecil terjadi, ataupun sebaliknya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disebutkan bahwa kelanjutan mengenai Pelaksanaan Bantuan Pupuk oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan informasinya belum sampai ke masyarakat Desa Air Hitam, dimana Kepala Desa Air Hitam menyampaikan keputusan untuk tidak ikut mengajukan bantuan tersebut adalah keputusannya, dan disampaikan pada saat kegiatan Apel Pagi rutin setiap hari senin yang pada saat itu yang hadir hanya perangkat desa, untuk ketua RT pada saat itu tidak sedang mengikuti kegiatan Apel pagi. Alasan Kepala Desa Air Hitam tidak ikut mengajukan bantuan pupuk adalah karena sebagian besar wilayah perkebunan desa Air Hitam adalah wilayah Hutan Produksi Terbatas, kecil kemungkinan Desa Air Hitam untuk lolos. Jika pun nanti ada sebagian kecil wilayah Desa Air Hitam yang wilayahnya tidak dalam Kawasan nantinya akan terjadi kecemburuan sosial bagi masyarakat lainnya, menurut Kepala Desa Air Hitam sulit untuk memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai hal ini. Maka dari itu Kepala Desa Air Hitam mengambil kebijaksanaan untuk keseluruhan Desa Air Hitam tidak ikut mengajukan bantuan pupuk. Begitu juga yang dikatakan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan untuk masyarakat yang sudah memiliki Kartu Penerima Bantuan sementara Desa Air Hitam tidak ikut mengajukan bantuan secara otomatis masyarakat tersebut tidak mendapatkan bantuan walaupun sudah memiliki kartu bantuan. Kartu Penerima tersebut diluar dari wewenang pihak Dinas dan hanya melakukan program bantuan ini sesuai dengan SOP yang sudah sangat jelas di dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022.

Sumber Daya

Salah satu bagian penting dari sebuah keberhasilan implementasi kebijakan adalah kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada. Manusia yang berkualitas adalah sumber daya yang sangat dibutuhkan dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Di dalam tahapan-tahapan dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan pekerjaan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam sebuah kebijakan. Apabila sumber daya manusia yang berkualitas tidak dimiliki dalam proses implementasi kebijakan, maka bisa dipastikan tingkat keberhasilan sebuah kebijakan kecil bahkan tidak bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan yang menangani implementasi program bantuan pupuk oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan yaitu Kepala Dinas, Bidang Sarana dan Prasarana dan juga bidang Penyuluh. Sumber daya manusia di Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan khususnya bidang Sarana dan Prasarana dan bidang Penyuluh melaksanakan bantuan ini sudah bagus dan sudah cukup maksimal yang dimana tugas bidang tersebut berkaitan dengan bantuan dan mengenai Anggaran sudah disebutkan dalam Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 40 Tahun 2022 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disposisi

Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sebuah sistem (implementor). Seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka implementor tersebut dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga

menjadi tidak efektif.

Sikap birokrasi pelaksana yang berkenan kesediaan dari implementasi untuk melaksanakan kebijakan publik tersebut seperti niat, kemauan, motivasi dan psikologi untuk melaksanakan suatu kebijakan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi penyaluran bantuan pupuk pemerintah Kabupaten Pelalawan dari pihak Desa Air Hitam dan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan, jika Desa Air Hitam mengajukan tidak terdapat kendala dalam kategori disposisi.

Struktur Birokrasi

Point terakhir menurut Edward III yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan adalah struktur birokrasi. Jika semua sumber daya yang dibutuhkan tersedia dengan baik, para pelaksana mengetahui apa yang harus dilakukan bahkan berkeinginan untuk mewujudkan sebuah kebijakan yang telah diputuskan berkemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana karena adanya kelemahan dalam struktur birokrasi. Sebuah kebijakan yang telah ditetapkan dan membutuhkan waktu yang panjang dalam proses perumusannya dan penuh dengan kompetisi serta permainan politik. Dalam pelaksanaannya kebijakan tersebut akan membutuhkan keterlibatan banyak orang atau saling kerjasama. Apabila distruktur birokrasi tidak bisa menciptakan kondisi yang kondusif dengan kebijakan yang ada bagaimana mungkin kebijakan tersebut dapat berjalan dan terlaksana dengan efektif. Hal akan menghambat jalannya pelaksanaan kebijakan.

Ada dua karakteristik disebutkan Edward III untuk mendukung kinerja struktur birokrasi kearah yang lebih baik, yaitu Standar Operating Prosedures (SOPs) dan melakukan Fragmentasi atau melakukan upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan pegawai diantara beberapa unit kerja.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembagian kerja yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan sudah dilakukan dengan baik dan dalam pelaksanaan program bantuan pupuk oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

SIMPULAN

Implementasi Program Bantuan Pupuk Oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan di Desa Air Hitam Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan tidak terlaksana. Hal ini berdasarkan hasil penelitian, wawancara, dokumentasi dan observasi yang peneliti lakukan terlihat dari indikator teori penulis gunakan seperti komunikasi antara pihak Desa Air Hitam dan Dinas Perkebunan dan Peternakan berjalan dengan baik akan tetapi komunikasi tidak berjalan baik antara desa dengan masyarakat terkait tidak informasi adanya Pelaksanaan Program Bantuan Pupuk oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan ke masyarakat Desa Air Hitam juga mengenai keputusan tidak ikut mengajukan program bantuan juga tidak diberitahukan ke masyarakat. Selanjutnya Sumber Daya Manusia untuk melaksanakan program bantuan pihak Desa Air Hitam menyatakan tersedia dan tidak ada kendala mengenai hal itu maupun Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan. Selanjutnya Disposisi, sudah cukup terlaksana terlihat dari tidak ada kendala di dalam pelimpahan wewenang. Terakhir, Struktur Birokrasi pelaksanaan ini pembagian kerja dari kebijakan penyaluran sudah jelas di dalam Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2022 dari pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan sudah cukup baik terhadap urusan pembagian kerja.

Terkait Komunikasi untuk memberikan informasi tentang Implementasi Program Bantuan Pupuk oleh Pemerintah Kabupaten Pelalawan dari pihak Desa Air Hitam ke masyarakat lebih ditingkatkan lagi, agar masyarakat dapat mengetahui tentang kelanjutan dari program bupati tersebut, agar mendapatkan kejelasan yang valid sebaiknya untuk tahun berikutnya jika program ini masih berlanjut Desa Air Hitam dapat mengajukan terlebih dahulu, agar nantinya pihak Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Pelalawan dapat melaksanakan observasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2014). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: IKAPI.
- Ali, F. (2012). *Studi Kebijakan Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Ali, Z. d. (2015). *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru: Marpoyan Tujuh Publishing.
- Anggara, S. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ardianto, E. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Public Relations Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Islamy, I. (2009). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Labolo, M. (2011). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Meleong, J. L. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Miftah, T. (2012). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Implikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mustafa, D. (2014). *Birokrasi Pemerintahan*. Bandung: IKAPI.
- Ndraha, T. (2005). *Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ndraha, T. (2011). *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nugroho D, R. (2012). *Public Policy*. Jakarta: Gramedia.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggara Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Prastowo, A. (2010). *Menguasai Teknik-teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Rauf, R. (2018). *Asas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rauf, R. d. (2015). *Lembaga Kemasyarakatan Di Indonesia*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Rauf, R. d. (2015). *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru: Zanafa Publishing.
- Silalahi, U. (2004). Komunikasi Pemerintahan: Mengirim Dan Menerima Informasi Tugas dan Informasi Publik. *Jurnal Administrasi Publik* , 36-37.
- Sri, R. A. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suharto, E. (2007). *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.

Syafiie, I. K. (2010). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.

Usman, H. (2014). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wahab, S. A. (2012). *Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.